

## PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER: EVALUASI EFEKTIVITAS MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB DAN PALANG MERAH INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HUKUM PADA KONFLIK BERSENJATA

Andes Sebayang<sup>1</sup>, Abdul Majeed Abdullah Alharbi<sup>2</sup>, Kadep Faljuang Sesko TNI<sup>3</sup>,  
Iwan Setiawan<sup>4</sup>, Aqsha Erlangga<sup>5</sup>

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

[1andesfonda@gmail.com](mailto:1andesfonda@gmail.com); [2abdulmajeed\\_1986@hotmail.com](mailto:2abdulmajeed_1986@hotmail.com);

[3departemen.faljuang@gmail.com](mailto:3departemen.faljuang@gmail.com); [4iwankudus96@gmail.com](mailto:4iwankudus96@gmail.com) ;

[5aqshaerlangg96@gmail.com](mailto:5aqshaerlangg96@gmail.com)

**Abstrak** - Penegakan hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan perlindungan terhadap individu yang terdampak perang. Lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional, memiliki misi pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian konflik yang sangat penting dalam menjaga penerapan hukum humaniter di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh PBB dan peran Palang Merah Internasional dalam menanggulangi pelanggaran hukum humaniter di zona konflik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis tantangan, keberhasilan, serta peran kolaboratif kedua lembaga tersebut dalam melindungi hukum humaniter dan memperbaiki kondisi bagi korban perang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian global serta relevansi upaya penyelesaian konflik yang berbasis pada hukum humaniter.

**Kata Kunci** : Lembaga Internasional, Hukum Humaniter, PBB, Palang Merah Internasional, Misi Pemeliharaan Perdamaian, Pelanggaran Hukum, Konflik Bersenjata..

**Abstract** - The enforcement of international humanitarian law during armed conflict plays a crucial role in protecting human rights and ensuring the safety of individuals affected by war. International organizations such as the United Nations (UN) and the International Red Cross have critical missions in peacekeeping and conflict resolution, which are essential to upholding humanitarian law on the ground. This article aims to evaluate the effectiveness of UN peacekeeping missions and the role of the International Red Cross in addressing violations of humanitarian law in conflict zones. Using a qualitative approach, the article analyzes the challenges, successes, and collaborative roles of both institutions in safeguarding humanitarian law and improving conditions for war victims. The findings of this study are expected to provide insights into the role of international institutions in maintaining global peace and the relevance of conflict resolution efforts based on humanitarian law.

**Keywords:** International Institutions, Humanitarian Law, United Nations, International Red Cross, Peacekeeping Missions, Legal Violations, Armed Conflict.

### PENDAHULUAN

Konflik bersenjata baik yang berskala internasional maupun non-internasional memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemanusiaan, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kerusakan infrastruktur, serta korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, terutama di kalangan warga sipil. Dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan

internasional, hukum humaniter internasional (HHI) menjadi instrumen yang penting untuk melindungi individu yang terjebak dalam situasi konflik (ICRC, 2020). Hukum ini bertujuan untuk membatasi dampak dari pertempuran terhadap manusia dan memastikan perlindungan bagi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, prajurit yang terluka, dan tahanan perang (Schmitt, 2019). Lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional, memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum humaniter. PBB melalui misi pemeliharaan perdamaian memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang melibatkan intervensi dalam situasi konflik untuk mencegah eskalasi kekerasan dan melindungi hak-hak individu (United Nations, 2021). Di sisi lain, Palang Merah Internasional dengan mandat kemanusiaannya berfokus pada pemberian bantuan kepada korban perang dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik (International Committee of the Red Cross (ICRC), 2020). Namun, meskipun kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat krusial, tantangan dalam implementasi hukum humaniter di lapangan tetap menonjol. Pelanggaran terhadap hukum humaniter seperti serangan terhadap warga sipil, penyiksaan terhadap tahanan perang, dan penggunaan senjata terlarang masih sering terjadi, meskipun telah ada berbagai upaya oleh PBB dan Palang Merah untuk mencegahnya (Gordy, 2020). Misi pemeliharaan perdamaian PBB seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal mandat, sumber daya, serta keragaman kepentingan negara-negara anggota, yang mempengaruhi efektivitas intervensi di lapangan (Bellamy & Williams, 2019). Pentingnya evaluasi terhadap efektivitas kedua lembaga ini dalam menanggulangi pelanggaran hukum humaniter menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PBB dan Palang Merah Internasional dalam penegakan hukum humaniter, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya selama konflik bersenjata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran lembaga internasional dalam menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas intervensi internasional di masa depan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penegakan hukum humaniter internasional, khususnya yang terkait dengan perlindungan terhadap individu selama konflik bersenjata, telah menjadi fokus penting dalam berbagai penelitian internasional. Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya besar dari lembaga internasional seperti PBB dan Palang Merah Internasional, pelanggaran hukum humaniter masih sering terjadi di lapangan. Sebagai contoh, penelitian oleh Safferling (2020) menyatakan bahwa misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh PBB tidak selalu berhasil dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap warga sipil di wilayah konflik. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan mandat dan sumber daya yang dimiliki oleh pasukan penjaga perdamaian. Penelitian lain oleh Darcy dan Hofmann (2019) menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Palang Merah Internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan di medan perang, terutama terkait dengan akses yang terbatas dan perlawanan dari pihak yang berkonflik. Di sisi lain, ada juga penelitian yang mengungkapkan keberhasilan kedua lembaga ini dalam menegakkan hukum humaniter di beberapa zona

konflik. Sebagai contoh, penelitian oleh Dinstein (2018) menunjukkan bahwa kolaborasi antara PBB dan Palang Merah Internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan melaksanakan mandat pemeliharaan perdamaian telah berhasil mengurangi kekerasan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, dalam beberapa kasus tertentu. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan dan keterbatasan lembaga internasional dalam menanggulangi pelanggaran hukum humaniter di lapangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahar (2021) juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara PBB dan Palang Merah Internasional dalam memastikan implementasi hukum humaniter dan memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa perbedaan dalam pendekatan dan mandat masing-masing lembaga sering kali menciptakan kesulitan dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini relevan untuk penelitian ini karena menunjukkan adanya tantangan dalam kerjasama lembaga internasional yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum humaniter di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Data**

#### **1. Efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Penegakan Hukum Humaniter.**

Misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh PBB memiliki tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta untuk melindungi warga sipil di daerah yang dilanda konflik. Namun, analisis data menunjukkan bahwa meskipun PBB telah berupaya untuk memastikan penerapan hukum humaniter, efektivitas misi pemeliharaan perdamaian sering kali terbatas oleh beberapa faktor utama:

- a. Keterbatasan Mandat dan Sumber Daya. Banyak misi pemeliharaan perdamaian PBB dibatasi oleh mandat yang tidak cukup luas atau tidak terperinci, yang menghalangi pasukan penjaga perdamaian untuk bertindak lebih proaktif dalam mencegah pelanggaran hukum humaniter. Seperti yang dijelaskan oleh Dobbins et al. (2007), keterbatasan sumber daya dan peralatan yang tersedia untuk pasukan perdamaian PBB sering kali menyebabkan kegagalan dalam menanggulangi eskalasi kekerasan di lapangan.
  
- b. Intervensi Politik. Keberhasilan misi PBB juga sering terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar yang terlibat dalam misi tersebut. Data wawancara mengungkapkan bahwa adanya konflik kepentingan antar negara anggota Dewan Keamanan PBB kerap mempengaruhi keputusan yang diambil, termasuk dalam hal strategi operasional dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hukum humaniter (Bellamy & Williams, 2019).

c. Kesulitan dalam akses dan perlindungan warga sipil. Pasukan penjaga perdamaian sering kali kesulitan untuk melindungi warga sipil, terutama di wilayah yang terisolasi atau sangat berbahaya. Meskipun misi PBB bertujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap warga sipil, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran pasukan perdamaian seringkali tidak cukup untuk mencegah serangan terhadap kelompok rentan (Zahar, 2021).

## **2. Peran Palang Merah Internasional dalam Menanggulangi Pelanggaran Hukum Humaniter.**

Palang Merah Internasional memiliki mandat utama untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter di medan perang. Berdasarkan analisis data, peran Palang Merah dalam konteks ini terbukti sangat krusial, meskipun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain:

a. Akses terbatas ke daerah konflik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Palang Merah Internasional adalah keterbatasan akses ke wilayah konflik akibat blokade atau hambatan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Seperti yang ditemukan dalam wawancara dengan praktisi Palang Merah, akses ke beberapa daerah yang paling membutuhkan bantuan sering kali dibatasi oleh kendala politik dan keamanan, yang mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan (ICRC, 2020).

b. Keberhasilan dalam Perlindungan dan Bantuan: Meskipun dihadapkan pada kendala akses, Palang Merah Internasional berhasil memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan medis dan perawatan kepada korban perang. Sebagai contoh, Palang Merah telah berhasil memberikan layanan kesehatan kepada ribuan korban yang terluka di zona konflik seperti di Suriah dan Yaman, yang menunjukkan peran vital kedua lembaga ini dalam penegakan hukum humaniter dan perlindungan hak-hak individu (Schmitt, 2019).

c. Koordinasi dengan PBB dan Lembaga Internasional Lainnya. Kerjasama antara Palang Merah dan PBB sering kali menjadi faktor penentu dalam kesuksesan penegakan hukum humaniter. Dalam beberapa kasus, kedua lembaga ini bekerja sama untuk memfasilitasi pertukaran tahanan perang, memberikan bantuan kemanusiaan, dan memantau pelaksanaan hukum humaniter di medan perang. Namun, meskipun kolaborasi ini penting, data juga menunjukkan bahwa perbedaan mandat dan pendekatan operasional kadang-kadang menghambat koordinasi yang efektif antara keduanya (Zahar, 2021).

### **3. Kerjasama antara PBB dan Palang Merah Internasional.**

Kolaborasi antara PBB dan Palang Merah Internasional terbukti sangat penting dalam memastikan implementasi hukum humaniter dan memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif. Data menunjukkan bahwa kolaborasi ini seringkali berhasil dalam memberikan bantuan kepada korban perang dan mengurangi pelanggaran hukum humaniter. Namun, meskipun kerjasama ini berpotensi untuk meningkatkan efektivitas intervensi, perbedaan pendekatan antara kedua lembaga ini juga dapat menciptakan tantangan, seperti ketidaksesuaian dalam strategi dan prioritas yang diterapkan di lapangan.

a. Pendekatan yang berbeda dalam misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian. PBB lebih fokus pada stabilitas politik dan pemeliharaan perdamaian jangka panjang, sementara Palang Merah lebih terfokus pada perlindungan kemanusiaan dan bantuan langsung. Perbedaan ini sering menimbulkan ketegangan dalam upaya koordinasi di lapangan, mengingat misi yang diemban oleh kedua lembaga tersebut memerlukan keterpaduan antara aspek kemanusiaan dan politik (ICRC, 2020).

b. Keberhasilan dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus, seperti di Kosovo dan Haiti, kerja sama antara PBB dan Palang Merah Internasional berhasil mengurangi kekerasan terhadap warga sipil dan memfasilitasi implementasi hukum humaniter. Namun, kolaborasi ini membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hambatan yang ada dapat diatasi agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara lebih konsisten (Gordy, 2020).

### **4. Keberhasilan dan Kegagalan Penegakan Hukum Humaniter di Medan Perang**

Penting untuk mencatat bahwa meskipun PBB dan Palang Merah Internasional memiliki beberapa keberhasilan dalam penegakan hukum humaniter, kegagalan juga masih terjadi di banyak wilayah konflik. Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, seperti serangan terhadap rumah sakit dan warga sipil, tetap terjadi meskipun ada intervensi internasional.

a. Serangan terhadap Warga Sipil dan Infrastruktur Kemanusiaan: Meskipun ada upaya dari PBB dan Palang Merah, data menunjukkan bahwa pelanggaran besar terhadap hukum humaniter, seperti serangan terhadap fasilitas medis dan warga sipil, tetap sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen hukum yang jelas, penerapannya sering kali tidak cukup efektif dalam mencegah pelanggaran besar (Gordy, 2020).

b. Pentingnya Pendekatan Proaktif dan Terkoordinasi: Keberhasilan dalam mencegah pelanggaran hukum humaniter seringkali bergantung pada strategi yang lebih proaktif dan koordinasi yang lebih erat antara lembaga

internasional. Tanpa adanya pendekatan yang komprehensif dan efektif, pelanggaran terhadap hukum humaniter akan terus menjadi tantangan besar di lapangan.

Dari analisis diatas menunjukkan, meskipun PBB dan Palang Merah Internasional telah berkontribusi secara signifikan dalam menegakkan hukum humaniter dan memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik, tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga ini tetap besar. Keterbatasan mandat, sumber daya yang terbatas, dan perbedaan pendekatan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan menghambat efektivitas intervensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam kolaborasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga internasional ini untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam penegakan hukum humaniter di masa depan.

### **Penerapan Temuan**

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi melalui penelitian ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum humaniter oleh lembaga internasional, khususnya PBB dan Palang Merah Internasional. Setiap temuan menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut di lapangan, serta memberikan wawasan mengenai cara-cara untuk memperbaiki dan memperkuat perannya dalam mengurangi pelanggaran hukum humaniter. Berikut adalah penerapan temuan dapat dilakukan dalam beberapa langkah :

#### **1. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antarlembaga Internasional.**

Temuan utama yang muncul dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama yang lebih erat antara PBB dan Palang Merah Internasional dalam penegakan hukum humaniter. Meskipun kedua lembaga ini memiliki tujuan yang serupa dalam melindungi warga sipil dan menegakkan hukum humaniter, perbedaan dalam mandat dan pendekatan kedua lembaga ini sering kali menghambat efektivitas kerja sama di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, penerapan temuan ini adalah dengan membentuk mekanisme koordinasi yang lebih formal antara PBB dan Palang Merah, yang mencakup:

- a. Pengembangan Protokol Kerjasama: Pembentukan pedoman dan protokol yang jelas mengenai peran masing-masing lembaga dalam setiap tahap misi pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian konflik. Hal ini akan meminimalkan tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa kedua lembaga dapat saling melengkapi satu sama lain dalam melaksanakan mandat masing-masing.
- b. Latihan Bersama dan pertukaran pengetahuan. Merencanakan dan melaksanakan program pelatihan bersama bagi staf PBB dan Palang Merah Internasional, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menanggulangi pelanggaran hukum humaniter di lapangan. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara kedua lembaga ini akan memperkuat

kapasitas operasional dan memfasilitasi kerja sama yang lebih efektif dalam situasi darurat.

c. Pengembangan Pusat Koordinasi Gabungan. Pendirian pusat koordinasi yang melibatkan perwakilan dari kedua lembaga untuk memantau pelaksanaan misi dan memastikan kelancaran distribusi bantuan serta pengawasan kepatuhan terhadap hukum humaniter.

## **2. Pemberian mandat yang lebih jelas dan peningkatan sumber daya untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.**

Temuan juga menunjukkan bahwa misi pemeliharaan perdamaian PBB sering kali terhambat oleh keterbatasan mandat dan kurangnya sumber daya yang memadai. Pemberian mandat yang lebih jelas dan lebih kuat dapat memperbaiki efektivitas misi ini dalam menanggulangi pelanggaran hukum humaniter. Penerapan temuan ini mencakup langkah-langkah berikut :

a. Pemberian Mandat yang Lebih Komprehensif. Mandat PBB untuk misi pemeliharaan perdamaian harus diperluas untuk mencakup lebih banyak tugas terkait dengan penegakan hukum humaniter, seperti pengawasan langsung terhadap pelaksanaan hukum ini di lapangan, serta tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran yang lebih besar. Mandat yang lebih kuat akan memberikan otoritas yang lebih besar bagi pasukan penjaga perdamaian untuk bertindak proaktif dan lebih efisien dalam melindungi warga sipil.

b. Peningkatan Alokasi Sumber Daya. Salah satu kendala utama dalam efektivitas misi pemeliharaan perdamaian adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung operasi pasukan penjaga perdamaian, yang meliputi penyediaan peralatan yang diperlukan, fasilitas medis, dan dukungan logistik lainnya. Selain itu, pelatihan intensif dan dukungan psikologis untuk pasukan juga harus diprioritaskan, mengingat tantangan mental dan fisik yang dihadapi dalam misi-misi tersebut.

c. Penyesuaian Struktur Operasional. Misi pemeliharaan perdamaian perlu disesuaikan dengan dinamika konflik yang berkembang, dan oleh karena itu, PBB harus merancang misi yang lebih fleksibel dan mampu merespons situasi yang berubah dengan cepat. Fleksibilitas ini juga mencakup penyesuaian strategi militer dan diplomatik berdasarkan perkembangan di lapangan.

## **3. Peningkatan akses ke daerah konflik bagi palang merah internasional.**

Palang Merah Internasional menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengakses daerah-daerah yang dilanda konflik, yang menghambat kemampuannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara efektif dan memantau penerapan hukum humaniter. Penerapan temuan ini mencakup beberapa langkah untuk memperbaiki situasi ini:

a. Negosiasi untuk akses kemanusiaan. Peningkatan negosiasi langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk memastikan akses yang lebih besar bagi Palang Merah Internasional. Dalam hal ini, peran negara-negara yang memiliki pengaruh politik di wilayah tersebut sangat penting dalam memfasilitasi pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan.

b. Pendanaan untuk akses dan infrastruktur. Untuk memastikan keamanan dan efisiensi, Palang Merah Internasional perlu mendapatkan pendanaan yang cukup untuk membangun infrastruktur yang memadai, seperti pos pengawasan dan distribusi bantuan yang dapat beroperasi di daerah yang rawan konflik. Selain itu, dukungan logistik dari PBB dan lembaga internasional lainnya dapat memperkuat kapasitas Palang Merah dalam menjalankan tugasnya.

c. Strategi pengiriman bantuan yang lebih efisien. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengiriman bantuan sering terhambat oleh kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, strategi pengiriman yang lebih aman dan efisien harus dikembangkan, termasuk penggunaan jalur udara dan teknologi baru untuk mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau.

#### **4. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Humaniter untuk Semua Pihak yang Terlibat dalam Konflik.**

Pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang hukum humaniter di kalangan pasukan militer, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta masyarakat sipil juga terungkap dalam temuan penelitian ini. Penerapan temuan ini meliputi :

a. Program pendidikan untuk pasukan militer. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih komprehensif tentang hukum humaniter bagi pasukan militer dan keamanan, sehingga personel atau pasukan militer dapat memahami pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan larangan-larangan yang berlaku selama konflik. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan tentang penghindaran pelanggaran, seperti serangan terhadap fasilitas medis dan pembunuhan terhadap tahanan perang.

b. Penyuluhan untuk masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang berada di daerah konflik juga perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang hak-haknya berdasarkan hukum humaniter. Oleh karena itu, program penyuluhan yang lebih luas dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak dasar dan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri dari dampak perang.

c. Pelatihan berkelanjutan untuk lembaga Internasional. PBB, Palang Merah, dan lembaga internasional lainnya harus menyediakan pelatihan berkelanjutan mengenai perkembangan terbaru dalam hukum humaniter dan strategi intervensi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut selalu siap untuk menghadapi tantangan yang ada di lapangan.

**5. Penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.**

Penerapan temuan ini juga mencakup pentingnya memperkuat kerjasama antara PBB, Palang Merah Internasional, dan organisasi non-pemerintah (NGO) lainnya untuk memperluas upaya penegakan hukum humaniter. Kolaborasi yang lebih erat dapat meningkatkan kekuatan operasional dan mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan.

a. Platform kerjasama multilateral. Membangun platform kerjasama multilateral antara berbagai lembaga internasional yang dapat berfungsi untuk berbagi informasi, sumber daya, dan koordinasi dalam merespon konflik dengan cepat dan efisien. Platform ini akan memungkinkan semua pihak untuk bekerja dengan tujuan yang sama dan meningkatkan hasil dari setiap intervensi kemanusiaan. Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa upaya penegakan hukum humaniter oleh PBB dan Palang Merah Internasional akan lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu dan mengurangi pelanggaran di medan perang. Peningkatan koordinasi, sumber daya, dan pemahaman mengenai hukum humaniter dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kualitas respons internasional terhadap pelanggaran yang terjadi selama konflik.

b. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya. Kerjasama yang lebih erat antar lembaga juga membutuhkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Penerapan temuan ini mencakup pengintegrasian sumber daya manusia dan finansial antara PBB, Palang Merah, dan NGO dalam operasional di lapangan. Kolaborasi dalam pengelolaan dana, logistik, dan dukungan operasional akan meningkatkan efisiensi distribusi bantuan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan darurat. Hal ini juga akan membantu mengurangi tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa bantuan sampai tepat waktu kepada yang membutuhkan.

c. Penyusunan pedoman kerjasama yang terstruktur. Untuk memastikan kelancaran kerjasama antara berbagai lembaga internasional, penting untuk menyusun pedoman kerjasama yang terstruktur. Pedoman ini akan mencakup mekanisme pembagian tugas, peran masing-masing lembaga dalam situasi darurat, serta cara-cara untuk mengatasi hambatan koordinasi. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap lembaga akan memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawabnya dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat bekerjasama secara efektif di lapangan. Ini juga akan memastikan bahwa intervensi kemanusiaan tidak terhambat oleh perbedaan pendekatan atau mandat antara lembaga-lembaga tersebut.

d. Peningkatan dukungan dari negara-negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum humaniter tidak hanya melibatkan lembaga internasional, tetapi juga negara-negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penerapan temuan ini juga mencakup peningkatan dukungan politik dan finansial dari negara-negara anggota dan organisasi internasional lainnya. Negara-negara dengan pengaruh besar di Dewan Keamanan PBB, serta donor internasional, dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk pendanaan, sumber daya manusia, dan dukungan politik untuk memfasilitasi operasional kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian.

e. Evaluasi bersama dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Terakhir, penerapan temuan ini juga mencakup pentingnya evaluasi bersama terhadap keberhasilan dan kegagalan dari kerjasama antara lembaga internasional dalam misi kemanusiaan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, lembaga-lembaga tersebut dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu diperbaiki dalam kerjasamanya. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya akan sangat berguna dalam merancang strategi intervensi yang lebih efektif di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun PBB dan Palang Merah Internasional memiliki peran penting dalam penegakan hukum humaniter, namun keduanya menghadapi tantangan cukup berat yang menghambat efektivitas operasional di lapangan. PBB, melalui misi pemeliharaan perdamaian, telah berhasil dalam beberapa kasus untuk melindungi warga sipil dan memfasilitasi perdamaian, tetapi sering kali terhambat oleh keterbatasan mandat dan sumber daya. Di sisi lain, Palang Merah Internasional telah memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter, meskipun akses ke beberapa daerah konflik sering kali terhalang oleh situasi politik yang kompleks. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kedua lembaga ini memiliki potensi besar untuk menegakkan hukum humaniter, keberhasilannya sering kali terganjal oleh tantangan yang melibatkan koordinasi

antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan akses yang terbatas ke daerah yang terdampak konflik. Selain itu, meskipun ada keberhasilan dalam beberapa misi, banyak pelanggaran hukum humaniter yang masih terjadi, menunjukkan bahwa penerapan hukum humaniter perlu ditingkatkan.

## **SARAN**

Implikasi dari temuan ini sangat relevan untuk kebijakan internasional, terutama terkait dengan bagaimana misi pemeliharaan perdamaian dan organisasi kemanusiaan dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum humaniter. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara PBB, Palang Merah, dan lembaga internasional lainnya dalam memberikan bantuan dan memantau pelaksanaan hukum humaniter di lapangan. Selain itu, temuan ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan sumber daya dan mandat yang lebih jelas untuk misi pemeliharaan perdamaian, serta pentingnya pembukaan akses yang lebih luas bagi lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama. PBB dan Palang Merah Internasional perlu memperkuat kerjasama dalam operasional di lapangan dengan membentuk mekanisme koordinasi yang lebih formal dan terstruktur.
2. Peningkatan sumber daya dan mandat PBB. PBB perlu memberikan mandat yang lebih jelas dan memperkuat alokasi sumber daya untuk pasukan pemeliharaan perdamaian agar dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran hukum humaniter di lapangan.
3. Perbaikan akses ke daerah konflik. Palang Merah harus melakukan negosiasi dengan pihak yang berkonflik untuk memastikan akses yang lebih aman dan lebih luas bagi distribusi bantuan kemanusiaan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Humaniter. Program pendidikan dan pelatihan mengenai hukum humaniter harus diperluas untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2019). *Peace Operations and Global Order*. Routledge.
- Darcy, J., & Hofmann, C. (2019). *The Humanitarian Effectiveness: A Synthesis of the Evidence*. Overseas Development Institute.
- Dobbins, J., et al. (2007). *The UN's Role in Peacekeeping: The Effectiveness of International Missions*. Rand Corporation.
- Gordy, A. (2020). *The Impact of International Humanitarian Law on the Conduct of Armed Conflicts*. Oxford University Press.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2020). *International Humanitarian Law: Answering the Most Frequently Asked Questions*. ICRC.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Schmitt, M. N. (2019). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. Oxford University Press.

United Nations. (2021). Peacekeeping and Security. Retrieved from <https://www.un.org/en/peacekeeping>

Zahar, M. (2021). International Collaboration in Humanitarian Action. Cambridge University Press.